

menimbulkan adanya perbedaan kepentingan, rivalitas, dan konflik-konflik sendiri. Hal ini jelas akan terjadi, karena masing-masing partai bisa mempunyai *interest atau* tujuan yang mungkin saling bertentangan. Awal mula timbulnya konflik di tubuh PPP sendiri sudah ada sejak masa Orde Baru. PPP saat itu mulai berkonflik seputar tentang pembagian jatah kursi kepengurusan. Hal ini menjadi wajar melihat karena memang di dalam tubuh PPP memiliki 4 (empat) corak sekaligus, yakni NU (Nahdlatul Ulama'), Sarikat Islam (SI), Muslim Indonesia (MI), dan juga Partai Islam Perti. Dan konflik PPP yang sekarang seputar tentang adanya faksi-faksi di dalamnya. Faksi PPP tidak hanya ada pada level pusat, melainkan juga sudah memunculkan faksi-faksi juga di tubuh PPP bahkan di level bawah, dalam penelitian ini yakni DPW PPP Jawa Timur.

1. Faksi-faksi dalam DPW PPP Jawa Timur

Adapun konflik elit PPP di tingkat pusat hingga akhirnya menyebabkan 2 (dua) Muktamar sekaligus dan menghasilkan dua kubu yakni antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy juga terdapat di PPP tingkat Provinsi, yaitu DPW PPP Jawa Timur.

Kubu Romahurmuziy yang merupakan Ketua Umum terpilih hasil Muktamar Surabaya di tingkat DPW PPP Jawa Timur adalah Musyaffa Noer yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW PPP Jawa Timur. Sedangkan kubu Djan Faridz di level DPW PPP Jawa Timur diwakili oleh Masykur Hasyim.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya memang terdapat faksi-faksi (kubu) di dalam DPW PPP Jawa Timur, yakni kubu Romy yang mayoritas menjadi pengurus di DPW PPP Jawa Timur dan juga kubu Djan Faridz. Selain harus mengetahui tentang penyebab munculnya konflik hal lain yang juga erat kaitannya dengan konflik itu sendiri adalah pihak yang berkonflik. Dalam penelitian ini pihak yang dimaksud adalah 2 (dua) kubu yang ada dalam DPW PPP Jawa Timur. Adapun kedua kubu ini bisa disebut sebagai elit dari partai politik PPP. Menurut Laswell, “Elit Politik mencakup semua pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat”.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan partai, adapun mereka adalah yang masuk dalam struktur kepengurusan. Hal ini terbukti dari pihak yang berkonflik adalah memang mereka yang memiliki jabatan penting dalam partai. Sejak awal mula konflik PPP tentang perbedaan pandangan politik itu, pihak yang berkonflik adalah elit partai PPP yakni SDA selaku Ketua Umum dan Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua. Konflik berlanjut pada adanya dualisme kepemimpinan dan klaim kepengurusan, antara kubu Djan Faridz dengan kubu Romahurmuziy. Mereka berdua juga jelas merupakan elit dari partai PPP karena sama-sama menyandang sebagai status Ketua Umum terpilih dari Muktamar VIII yang dilaksanakan di tempat yang berbeda.

Kubu Djan Faridz sesuai dengan pendapat Suzanne Keller yang menyebutkan bahwa yang disebut dengan elit adalah mereka yang tetap berpengaruh sekalipun tidak masuk dalam kepengurusan, karena memang di DPW PPP Jawa Timur sendiri hanya boleh ditempati oleh mereka yang pro dengan Romy selaku Ketua Umum PPP periode 2014-2019 hasil dari Muktamar VIII Surabaya. Oleh sebab itu mereka yang tidak pro dengan Romy sekalipun pada periode sebelumnya menjadi pengurus di DPW PPP Jawa Timur maka diberhentikan. Kubu Djan Faridz sendiri dalam penelitian ini adalah Masykur Hasyim (selaku Ketua DPW PPP Jawa Timur versi Djan Faridz) dan juga Mujahid Anshori (Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur versi Djan Faridz). Dan jelas elit politik dari kubu Romy adalah segenap jajaran pengurus di DPW PPP Jawa Timur, namun dalam penelitian ini ada Musyaffa Noer (Ketua DPW PPP Jawa Timur), Didik Noerman dan Zuman Malaka.

2. Model Konflik

Seiring dengan berjalannya waktu, dinamika politik di tubuh PPP pun semakin hebat. Termasuk di dalamnya adalah konflik internal antar pengurus yang akhirnya menimbulkan dualisme kepemimpinan. Yang paling aktual adalah saat Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Perbedaan pandangan politik terkait koalisi partai saat pilpres ini pun akhirnya menimbulkan faksi-faksi pula dalam tubuh PPP. Kubu SDA yang lebih pro kepada Prabowo tetap saja bersikukuh dengan pilihannya adalah keputusan partai, dan kubu Emron Pangkapi juga yakin dengan pilihannya untuk berkoalisi dengan Calon Presiden nomor urut 2 (dua) saat itu yakni Jokowi dan Yusuf Kalla. Dan akhirnya kedua kubu ini tidak hanya

memiliki perbedaan pandangan politik melainkan juga menyelenggarakan 2 (dua) Mukhtamar Partai di tempat yang berbeda.

Jika membahas tentang konflik maka harus ditelusuri juga apakah penyebab dari munculnya konflik tersebut. Bukan rahasia umum lagi bahwa konflik yang terjadi pasti ada sebab dan musababnya. Jika dikaitkan dengan PPP, awal mula PPP mulai berkonflik adalah karena adanya perbedaan pandangan politik terkait dengan pilihan untuk koalisi. Menurut penulis penyebab dari munculnya konflik perbedaan pandangan politik tersebut bisa dikarenakan adanya intervensi dari pihak luar (dalam hal ini pemerintahan). Saat itu, SDA memutuskan untuk berkoalisi dengan pasangan Prabowo, namun ada di internal partai PPP juga yakni kubu Emron Pangkapi lebih memilih untuk pro dengan Jokowi.

Kembali pada persoalan konflik yang ada di tubuh PPP hingga berdampak pula pada DPW PPP Jawa Timur, semua itu berawal dari perbedaan pandangan politik. Dampaknya pada DPW PPP Jawa Timur sendiri akhirnya menghasilkan faksi ataupun kubu di dalamnya.

Menurut teori Fisher, pola konflik dibagi ke dalam tiga bentuk : (1) Konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. (2) Konflik manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam efeknya. (3) Sedangkan konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat di atasi

dengan menggunakan komunikasi. Menurut penulis konflik elit Partai PPP yang ditandai dengan terjadi perbedaan pandangan antara Suryadharma Ali dengan Romahurmuziy, termasuk kedalam bentuk konflik yang dikemukakan oleh Fisher yaitu Konflik Permukaan karena Suryadharma Ali dan Romahurmuziy secara personal berbeda pemikiran secara politik. Perbedaan pemikiran, pendapat, dan pilihan inilah yang dikategorikan sebagai konflik yang dikenal dengan istilah konflik permukaan karena konflik ini yang tahu adalah masing-masing pribadi dan tidak terlihat secara kasat mata karena tidak menggunakan benda-benda fisik. Berdasarkan penjelasan di atas konflik Partai PPP juga masuk kedalam konflik laten. Hal ini jelas berbeda dengan konflik PPP jaman Orde Baru yang hanya melibatkan internal partai dan berputar soal jatah kursi seperti yang telah disebut di atas. Model konflik PPP sekarang bukan lagi soal aliran yang akhirnya menjadi fusi politik ini, melainkan juga melibatkan faktor eksternal ataupun intervensi pihak luar. Jika masa Orde Baru, persoalan aliran dalam PPP selalu menjadi awal mula dari konflik juga, maka sekarang PPP sudah tidak begitu memperhatikan soal itu. Konflik PPP sekarang dominan persoalan kepentingan dan juga kekuasaan.

Dan untuk persoalan awal mula munculnya konflik di tubuh PPP yang ditandai dengan perbedaan pandangan politik antara SDA dan juga Romy, maka yang juga harus diperhatikan adalah apa yang menjadi sebab awal hingga munculnya perbedaan pandangan politik itu. Menurut penulis, perbedaan pandangan politik yang terjadi di PPP terlebih menjelang pilpres tahun 2014 lalu dikarenakan besarnya kepentingan dari satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut penulis, konflik dari PPP ini adalah karena adanya perbedaan kepentingan sehingga memunculkan kubu-kubu juga di dalamnya. Perbedaan pandangan politik tidak akan terjadi apabila internal partai solid menyatukan suara demi terwujudnya visi misi partai sebagai yang terpenting di atas kepentingan ataupun ambisi pribadi. Sejak berdirinya PPP sendiri memang sudah familiar dengan konflik hanya saja yang menjadikannya berbeda dengan konflik PPP yang sekarang adalah intervensi pemerintah yang lebih kuat ditambah lagi ambisi pribadi dari aktor tertentu juga menyebabkan PPP semakin rentan mengalami perpecahan.

Adanya faksi-faksi dalam DPW PPP Jawa Timur jika dilihat dalam konteks faksionalisme maka sesuai dengan pendapat Patrick Köllner bahwasanya faksionalisme dibagi menjadi 3 yakni geng faksi, faksi kline (pribadi), dan faksi organisasi (pelembagaan faksi). Faksi dalam DPW PPP Jawa Timur ini sesuai dengan Faksi Organisasi. Faksi dilembagakan atau organisasi, adalah jenis yang paling formal. Jenis ini memiliki mekanisme dalam merekrut anggota, dan memiliki aturan dan prosedur formal daripada mengandalkan ikatan pribadi rekrutmen pemimpin-pengikut. Indikator yang sering berlaku untuk jenis golongan ini mencakup memiliki pejabat, yang tunduk pada aturan formal dan mengikuti prosedur biasa, memiliki nama atau simbol non-pribadi untuk kelompok. Hal ini sesuai dengan faksi dalam DPW PPP Jawa Timur yang masing-masing dari faksinya membentuk kepengurusan.

Dalam konteks internal parpol, penyebab faksionalisme diantaranya kuat dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama yaitu ideologi, kedua kepemimpinan partai,

dan ketiga karakter patronase. Pertama dalam konteks ideologi, parpol dengan basis ideologi yang kokoh biasanya memiliki daya tahan yang kuat terhadap perpecahan internal. Sebaliknya, semakin pragmatis karakter partai, semakin rentan pula lah partai tersebut terhadap perpecahan. PPP sendiri khususnya di DPW PPP Jawa Timur juga memang selalu berpegang teguh pada azas Islam yang memang menjadi acuan partai hanya saja tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan terkadang menjadi yang lebih menggoda. Kedua, parpol dengan tradisi kepemimpinan yang baik juga lebih siap dalam mengelola benturan politik internal dibandingkan parpol dengan corak kepemimpinan kharismatik atau kepemimpinan instan, karena sebagian besar penyebab faksionalisme terkait dengan persaingan dalam merebut kendali politik partai. Di DPW PPP Jawa Timur bisa muncul faksi-faksi di dalamnya juga dikarenakan adanya persaingan antar faksi untuk merebut kendali politik partai. Yakni antara kubu Musyaffa Noer dan juga kubu Masykur Hasyim.

Ketiga, faktor internal lain yang sangat mempengaruhi pengelolaan faksionalisme adalah karakter patronase di dalam partai. Model patronase politik tradisional dimana hubungan antara patron politik dengan kader-kadernya yang sangat bersifat informal dan personal berpotensi besar mengancam struktur legal formal partai. Karena loyalitas personal justru menjadi lebih menentukan daripada mekanisme formal. Hal ini terlihat dari loyalitas personal terhadap patron politik lebih kuat daripada loyalitas terhadap *platform* perjuangan partai. Namun sebaliknya dengan model patronase politik yang lebih modern, hubungan patron politik dan kadernya lebih bersifat organisasional-formal. Patronase model ini

dia menang. Berhubung ya SDA masuk (menjadi tersangka) jadi gak mungkin diteruskan. Masih ada kesempatan untuk banding, dan kasasi. Sekalipun nanti di tingkat PT TUN dimenangkan oleh pihak manapun tetap keputusan kembali ke hasil Muktamar 5 tahun lalu yaitu SDA Ketua Umumnya dan Romy sekretaris. Djan Faridz itu hanya orang baru”.

Jadi jelas sudah perbedaan antara konflik PPP jaman dahulu dengan konflik PPP yang sekarang. Adapun perbedaannya terletak pada penyebab munculnya konflik dan juga pihak yang berkonflik. PPP masa Orde Baru penyebab konfliknya hanya seputar tentang pembagian jatah kursi di kepengurusan, semisal ketuanya dari pihak NU maka sekretarisnya harus dari MI. Namun konflik PPP yang sekarang walaupun memang masih seputar pembagian kekuasaan, tetapi juga melibatkan pihak luar dalam konflik internalnya. Yang disebut dengan intervensi pihak luar adalah kemungkinan pemerintah untuk ikut campur sehingga memunculkan perbedaan pandangan politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu pastinya.

Fakta ini menjadi menarik karena memang PPP yang merupakan partai politik Islam sekalipun juga rentan dihindangi konflik. Jika dikaitkan dengan kepengurusan di DPW PPP Jawa Timur sendiri, maka peta politik yang terbentuk karena konflik yang terjadi di elit partai PPP adalah terdapat faksi-faksi juga di dalamnya.

Latar belakang PPP yang merupakan fusi politik dari 4 (empat) partai politik Islam yang tersohor waktu itu pun menyebabkan PPP sendiri juga terbiasa menghadapi banyak perbedaan tentunya. Hanya saja saat itu perbedaan tidak menjadi masalah sebab karena yang menjadi prioritas adalah visi misi partai. Perbedaan pandangan itu kini menjadi masalah karena ambisi pribadi yang lebih

pemilu yang dijalankan partai politik. Kekuatan partai politik juga yang menentukan hampir sebagian besar proses kepemimpinan di Indonesia termasuk pemilihan presiden Indonesia dan pemimpin lembaga negara lainnya.

Mengingat peran strategisnya dalam kehidupan politik Indonesia, partai politik menjadi bagian penting dalam memperoleh kekuasaan. Itu mengapa setiap orang atau kelompok dalam masyarakat termasuk kelompok Islam mendirikan partai politik. Diharapkan pendirian parpol dapat menjadi alat efektif kelompok Islam dalam memperjuangkan keyakinan, aspirasi dan kepentingannya sehingga menjadi keputusan bersama yang mendapatkan legalitas secara hukum. Maka tidak mengherankan, sepanjang sejarah Indonesia, parpol Islam terus berusaha mengambil peran aktif sejak pemilu pertama kali digelar.

Dalam masa kepemimpinan Soeharto, kanalisasi politik umat Islam dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan sempat memunculkan harapan akan penyatuan suara umat Islam kepada PPP. Harapan itu lahir, mengingat dominan umat Islam adalah penduduk mayoritas negeri ini. Apalagi sebelumnya, Masyumi pernah berhasil memegang peranan penting dalam perpolitikan Indonesia pada tahun 1955. Nyatanya sepanjang Orde Baru berkuasa, parpol Islam kehilangan daya tarik disebabkan kuatnya dominasi Partai Golkar yang dikendalikan Soeharto. Dengan bermodalkan kekuatan Golkar, birokrasi dan militer, denyut nadi kehidupan parpol Islam semakin jauh terpendam masa itu.

Jika dilihat pada Pemilu 2004, PKB mendapatkan 62 kursi (10,57%), PPP 58 kursi (8,15%), PKS 45 kursi (7,34%) dan PAN 42 kursi (6,44%). Perubahan peta politik ini khususnya dalam partai politik Islam disebabkan persoalan konflik

internal yang semakin membesar. Hasil pemilu 2009 dapat dikatakan pemilu terburuk, sebab partai politik Islam terlempar dari posisi 3 besar. PKS mendapatkan 51 kursi (7,88%), PAN 42 kursi (6,01%), PPP 35 kursi (5,32%) dan PKB 26 kursi (4,94%).

Di dalam masyarakat yang demokratis, perbedaan pendapat dan persaingan dalam sebuah organisasi atau partai politik adalah sebuah kewajaran. Perbedaan itu disebabkan setiap manusia atau kelompok memiliki kepentingan, status, tujuan dan nilai yang tidak sama. Untuk mempertemukan kepentingan yang ada, maka diperlukan sebuah cara yang tepat dalam pengelolaannya sehingga tidak berujung perpecahan. Namun, perbedaan kepentingan itu kadang tidak mudah dikelola dengan baik sehingga berujung konflik yang dapat membahayakan eksistensi organisasi atau partai politik di masa mendatang. Secara umum, hampir dapat dikatakan konflik sudah menjadi bagian penting dalam partai politik Islam dimana menjelang Pemilu atau pergantian kepemimpinan partai konflik politik internal selalu bermunculan. Ketika momentum pergantian kepemimpinan parpol Islam disibukkan mengurus konflik internalnya sehingga berujung kepada kepemimpinan ganda (dualisme kepemimpinan). Akibat konflik itu tentunya berpengaruh kepada citra politik Islam di Indonesia secara keseluruhan.

Kenyataan itu juga seakan membenarkan asumsi bahwa sejarah politik Islam Indonesia adalah sejarah konflik dan perpecahan, sehingga konsep ukhuwah selalu gagal diterjemahkan dengan baik. Kita masih menilai wajar jika terjadi konflik di zaman Orde Baru, sebab ada intervensi kekuasaan pemerintah dalam

setiap parpol. Tapi pada situasi sekarang, konflik parpol Islam menandakan kegagalan pengurus partai dalam mengelola manajemen konflik secara sehat dan dewasa.

Perpecahan dalam parpol sampai saat ini disebabkan belum ada kedewasaan berpolitik. Perpecahan partai politik umumnya disebabkan oleh egoisme politik yang begitu besar dan merupakan indikasi ketidakdewasaan partai tersebut. Ketidakdewasaan partai juga ditunjukkan dengan ketidak beranian partai politik terkait untuk menjadi independen. Ketidakdewasaan ini mudah terjadi, sebab penguasaan sumber daya politik memang cenderung bagaimana mengejar kekuasaan. Fenomena ini pun terlihat pada PPP yang terpecah dua antara faksi Romahurmuziy dan faksi Djan Faridz.

Menurut penulis, masa depan dari PPP terlebih setelah dilanda konflik internal ini akan tetap mempunyai tempat di masyarakat hanya saja memang harus lebih ekstra perjuangannya untuk tetap berjaya. Bukankah pelaut yang handal tidak dihasilkan dari mengarungi lautan yang tenang saja. Sama halnya dengan PPP yang diibaratkan sebagai pelautnya maka harus terbiasa untuk menghadapi banyak model 'laut' dimana yang dimaksud adalah konflik yang mungkin saja hadir dalam perjalanan. Jika akhirnya banyak konflik yang melanda tubuh PPP ini maka positifnya adalah PPP bisa semakin berkembang di masa depan dengan catatan bila pengurus partai bisa mengolah konflik ini menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk partai. Sesuatu yang menguntungkan bagi partai adalah dengan adanya konflik tersebut setidaknya masyarakat luas juga menjadi semakin mengenal PPP. Dan menjadi hal yang memalukan adalah jika PPP dikenal sebagai

selain memang pesona partai nasionalis lebih menjanjikan seperti halnya, sampai-sampai PKS pun sekarang kan jadi Partai Nasionalis. Jadi gimana caranya ini membuat parpol Islam lebih menarik”.

Karena corak PPP yang berbeda dari partai politik Islam lainnya ini setidaknya bisa dijadikan nilai lebih juga bagi pengurus partai untuk tetap mengibarkan eksistensi partainya. Menurut penulis pun PPP tetap akan berkembang di masa depan terlepas dari semua konflik yang ada. Sekalipun memang susah untuk mengembalikan kejayaan partai politik Islam saat seperti Pemilu 1999 lalu tetapi terus berada di pemerintahan hingga saat ini pun bukan suatu hal yang mudah terlebih memang partai politik Islam selalu menjadi pilihan kedua bagi masyarakat.

Masa depan partai berbasis Islam di Indonesia akan sangat rentan jika tidak segera melakukan perubahan. Menurut penulis, partai-partai Islam memang tidak akan bisa menjadi besar tetapi tetap bisa terus menjadi kesatuan dalam pemerintahan. Karakter rakyat Indonesia yang mayoritas muslim memang cenderung menyukai keberagaman. Islam sendiri masuk ke Indonesia setelah sebelumnya masuk animisme, Hindu, Budha. Bahkan Islam sendiri di Indonesia ini sangat beragam dan lengkap, dari semua mazhab ada, bahkan berbagai aliran pun muncul dan banyak pengikutnya.

Sekalipun sering dilanda konflik, optimistisme tetap disampaikan oleh Musyaffa' Noer terkait masa depan PPP. Berikut pernyataannya:

“PPP masih eksis. Sangat bisa eksis. Gak ada pengaruh dari DPW Pak Maskur. PPP sudah biasa kena angin. Kita loh partai politik harus paham hukum, apalagi kan partai Islam ya kudu tau etik. Yang diperebutkan Pak Maskur apa wong sudah bentuk pengurus baru kan. Dalam rangka menghadapi pilkada serentak, berjalan normal. Setelah ada konflik ini berjalan semakin harmonis. PPP tetap

Islam memang tidak hanya bergantung pada internal partai saja melainkan juga butuh dukungan dari kaum Islam pula. Pelembagaan partai politik yang optimal akan bisa mengelola konflik yang ada. Karena pemilih Islam sekarang makin rasional. Tidak hanya tertarik pada isu-isu keagamaan saja tetapi sudah mulai paham tentang pencitraan yang baik secara ekonomi juga. Oleh sebab itu eksistensi parpol Islam bisa ditingkatkan dengan inovasi yang lebih kekinian sehingga konstituen tidak jenuh dengan konflik yang ada.

Dalam ranah internal partai khususnya PPP, ketika terjadi konflik maka diupayakan penyelesaian dengan dialog yang intensif dan konsolidatif dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah. Berbagai ketidakpuasan yang muncul dalam sebuah pergantian kepemimpinan atau kebijakan partai hendaknya disikapi dengan bijaksana, serta mengedepankan mentalitas siap menang dan kalah. Ketika mentalitas ini terkonstruksi, maka perasaan “kalah dan tersingkir” tidak akan pernah ada. Terbangunnya mentalitas itu juga menjadi contoh bagaimana mengelola konflik kepartaian secara sehat dan dewasa.

Persoalan mendasar yang harus diselesaikan adalah meredakan ketegangan faksi politik dalam tubuh internal PPP. Jika konflik internal dapat terselesaikan, maka konsolidasi internal yang bertujuan mengorganisir, memobilisasi, merumuskan dan menyuarakan kepentingan umat Islam akan berjalan dengan lebih baik. Sekali lagi, kuncinya sekarang bermuara kepada sejauh mana partai politik Islam mampu mengelola konflik sehingga mampu merebut kepercayaan masyarakat pemilihnya.

Menurut penulis, PPP tetap bisa eksis di dunia perpolitikan Indonesia dengan merubah strategi partainya yang masih cenderung lebih sering menjual isu keagamaan saja menjadi partai Islam yang juga peka terhadap persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Konflik PPP masa Orde Lama hanya seputar tentang ideologi saja kini menjadi konflik tentang pragmatisme masyarakat juga. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai yang rentan dilanda konflik ditambah juga dengan semakin rasionalnya pemilih maka menciptakan atmosfer pragmatisme di masyarakat. Basis massa di PPP memang mereka para tradisional yang sangat menjunjung tinggi *Urip Mati yen PPP*-nya, namun tetap harus diimbangi dengan strategi partai yang lebih modern sehingga tidak tergerus dengan konflik yang ada. Menuju partai yang lebih modern ini bisa diwujudkan dengan menjadi advokasi bagi masyarakat. Jadi tetap menjadi Partai yang menjunjung tinggi *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yang diwujudkan dalam isu-isu kebangsaan seperti pendidikan, moral, dan sebagainya. Menjadi partai Islam yang modern juga dengan memperhatikan manajemen kelembagaannya agar tetap berjalan stabil, menjunjung akuntabilitas keuangan partai, dan yang paling penting adalah melaksanakan program partai yang mengoperasionalkan kebutuhan masyarakat baik dalam hal ideologi maupun sosial. Faktanya bahkan sekarang masyarakat seolah sudah YES untuk Islam tetapi NO untuk Partai Islamnya. Oleh sebab itu citra parpol Islam, khususnya PPP lebih dibuat menarik dengan inovasi-inovasi baru seperti kaderisasi dan konsolidasi yang dilakukan secara modern.

Masa depan PPP sendiri jika dilihat dalam jangka pendek yakni adanya Pilkada Serentak ini maka penulis sepakat dengan pendapat Mujahid Anshori

